

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah sebagai lembaga/organisasi yang bergerak dalam sektor publik merupakan pendorong sekaligus sebagai fasilitator didalam keberhasilan suatu pembangunan. Peristiwa yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini adalah menguatnya tuntutan keterbukaan informasi atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial khususnya di daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja kepada masyarakat (Admaja & Wahyundaru, 2020).

Hal ini sesuai dari amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja dari sebuah pemerintahan sebagaimana dijelaskan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBN atau pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2022).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah di kota Makassar yang menerapkan sistem pelayanan satu pintu. DPMPTP Kota Makassar sebagai instansi yang khusus bertugas memberikan pelayanan mengenai perizinan yang langsung bersinggungan kepada masyarakat, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi manajemen pemerintah daerah yang diharapkan mampu memberikan

pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Pembentukan DPMPTSP Kota Makassar awalnya dikenal sebagai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM). Pemerintah Kota Makassar membentuk Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar pasal 26 bahwa DPMPTSP Kota Makassar menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan, administrasi, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. DPMPTSP Kota Makassar merupakan instansi yang memberikan jasa pelayanan publik di sektor perizinan.

Pembentukan DPMPTSP Kota Makassar sebagai wujud nyata komitmen kota Makassar dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan memberikan pelayanan secara terpadu sehingga memudahkan masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh perizinan. Salah satu bentuk pelayanan umum kepada masyarakat itu adalah pelayanan prima di bidang perizinan, yang dimaksud pelayanan perizinan yang prima adalah pelayanan terpadu satu pintu yang dapat mencerminkan suatu bentuk pelayanan yang memenuhi prinsip pelayanan yang jelas, sederhana, pasti, aman, efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, ekonomis, adil, dan merata.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat

dikatakan bahwa Laporan Keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Banyak faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan yaitu Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal.

Laporan keuangan daerah adalah representasi terstruktur dari posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan entitas pemerintah daerah dalam satu periode anggaran, serta pertanggungjawaban atas kinerja keuangan kepada publik. Laporan keuangan daerah sebagai bagian dari proses pelaporan yang menyajikan posisi keuangan secara terstruktur dari transaksi yang dilakukan entitas pemerintah daerah (Bastian 2007).

Pengertian kapasitas sumber daya manusia adalah Suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal (Bintoro dan Daryanto, 2017:15).

Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan teknologi secara terintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu, baik untuk mengolah, menyimpan, menyajikan, maupun mengkomunikasikan informasi secara efisien. Pemanfaatan ini mencakup pengolahan data secara elektronik,

penggunaan sistem manajemen, hingga aplikasi teknologi untuk memudahkan akses layanan dan mencapai strategi organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah penggunaan komputer untuk mengkonversi, mengubah, menyimpan, mengolah, mengirim, dan menerima informasi (Fauziah dan Hedwig, 2010).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem yang diselenggarakan secara menyeluruh di instansi pemerintah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pemerintahan tercapai secara efektivitas dan efisiensi, laporan keuangan andal, aset negara aman, dan kepatuhan terhadap peraturan terpenuhi. SPIP mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian.

Salah satu masalah utama dalam kualitas laporan keuangan adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Banyak pejabat atau staf yang tidak memiliki pelatihan atau pendidikan yang memadai terkait akuntansi pemerintahan. SDM yang kurang berpengalaman atau tidak terlatih dengan baik dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dapat mengurangi kualitas laporan tersebut.

Adapun penerapan aplikasi keuangan yang tidak optimal, mungkin menggunakan aplikasi keuangan yang tidak terintegrasi dengan baik atau belum sepenuhnya dimanfaatkan. Hal ini menghambat kecepatan dan keakuratan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sedangkan risiko keamanan data penggunaan teknologi informasi juga berisiko terhadap keamanan data keuangan. Jika system yang digunakan tidak aman, data keuangan bias rentan terhadap manipulasi atau kebocoran informasi.

Teori Keagenan ini membahas tentang pihak manajemen yang diperintahkan atau ditugaskan pihak pemilik perusahaan untuk melaksanakan praktik di lapangan. Teori keagenan juga memiliki pemisahan kepemilikan dan pengendalian internal yang berkaitan atau berhubungan langsung antara principal dan agen. Pemisahan yang terjadi kepemilikan dan pengendalian perusahaan, maka dapat menimbulkan asimetri informasi. Hubungan keagenan antara pemegang saham dan manajer dapat menyebabkan permasalahan (agency conflict) yang terjadi karena akibat dari keinginan manajemen (Kalbuana & Yuningsih, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan meneliti hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan judul **“PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan maka ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar ?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar ?
3. Apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar ?
4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar ?
5. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar ?
6. Apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Mediasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar ?
7. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mediasi Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti bertujuan :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Mediasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar

7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mediasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Instansi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan/instansi pemerinta dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Makassar untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga dapat mencapai tujuan organisasi.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi kepustakaan dan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menurut Barli (2018) teori yang menyatakan hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Manajemen (*agent*) memiliki kebijakan untuk mengatur perusahaan dan mengambil keputusan atas nama investor. Sedangkan menurut Kimsen et al. (2019) Teori Keagenan (*Agency Theory*) adalah teori yang menjelaskan bahwa adanya hubungan kerjasama antara pihak (*principal*) yaitu investor yang memberi wewenang dengan pihak (*agensi*) yaitu manajer sebagai penerima wewenang. Pihak manajemen dapat kemungkinan melakukan untuk kepentingan pribadi daripada kepentingan para pemegang saham. Teori agensi dapat terjadinya perbedaan kepentingan antara kepemilikan dengan agen yang memicu praktik kecurangan yang dilakukan pihak agen. Teori Keagenan ini membahas tentang pihak manajemen yang diperintahkan atau ditugaskan pihak pemilik perusahaan untuk melaksanakan praktik di lapangan. Teori keagenan juga memiliki pemisahan kepemilikan dan pengendalian internal yang berkaitan atau berhubungan langsung antara *principal* dan agen. Pemisahan yang terjadi kepemilikan dan pengendalian perusahaan, maka dapat menimbulkan asimetri informasi. Hubungan keagenan antara pemegang saham dan manajer dapat menyebabkan permasalahan (*agency conflict*) yang terjadi karena akibat dari keinginan manajemen (Kalbuana & Yuningsih, 2020).

2.1.2. Manajemen Keuangan Daerah

Menurut Halim (2009 : 27) bahwa manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan pada suatu daerah untuk membiayai keseluruhan kewajiban daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Selanjutnya Mahesa (1995 : 31) menjelaskan kedua alat pelaksanaan manajemen keuangan daerah sebagai berikut :

1. Tata usaha umum menyangkut kegiatan - kegiatan kearsipan meliputi surat menyurat, mengagenda, mengekspedi, menyimpan surat penting atau mengarsipkan dan kegiatan dokumentasi lainnya selanjutnya disebut Tata Usaha Arsip Daerah.
2. Tata Usaha Keuangan menyangkut kegiatan yang dilakukan secara sistematis dibidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standarisasi, dan prosedur keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan informasi actual dibidang keuangan daerah ini telah mengalami perubahan nama dari tata usaha keuangan daerah (pada era pra reformasi).

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (meskipun bukan pendapat ahli, relevan secara normatif) Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai

dengan uang, serta segala bentuk kekayaan daerah yang dapat dijadikan milik daerah.

Dari berbagai definisi di atas, manajemen keuangan daerah dapat disimpulkan sebagai:

Proses pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban, yang dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

2.1.3. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama jalannya kegiatan sebuah organisasi, keberhasilan perusahaan ditentukan oleh keberadaan sumber daya itu sendiri. Setiap perusahaan atau instansi harus mengatur dan memperhatikan keberadaan karyawannya untuk meningkatkan kinerja yang baik serta menciptakan karyawan yang berkualitas. Salah satu peran terpenting dari manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan kesempatan kepada sumber daya manusia di perusahaan agar dapat berperan aktif dan optimal dalam pencapaian tujuan perusahaan (Sutrisno, 2011).

kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan total individu (mental & fisik) untuk berkontribusi pada tujuan organisasi, didukung oleh pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan motivasi, mencakup aspek siap, mau, dan mampu (willing, able, ready) serta bagaimana mereka diberdayakan dan dikelola secara efektif. Manajemen sumber daya manusia sebagai ilmu yang mempelajari pemberdayaan karyawan, pengembangan pekerjaan, kelompok kerja, serta peningkatan kinerja (Bohlander dan Snell, 2010).

Nasution (2011: 1), kapasitas ialah kecakapan individu untuk melakukan hal yang terwujud melalui tindakan yang berimplikasi bagi produktivitas kerja. (Indriasari 2008), kapasitas SDM ialah kemampuan individu, lembaga, ataupun sistem guna menjalankan fungsi ataupun

wewenang dengan tujuan mewujudkan kinerja bernilai baik. Sedangkan, karakteristik kapasitas yang terlihat di dalam model *iceberg* menurut (R. Palan 2007) meliputi pengetahuan, keterampilan, konsep diri. Pengetahuan (*knowledge*) ialah aset setiap individu yang didapat melalui pengalaman pribadi ataupun pengalaman individu lain. (Bagia 2015), pengetahuan ialah informasi bermakna yang dimiliki individu pada bidang tertentu. Pengetahuan tidak hanya didapat melalui proses Pendidikan, tetapi juga melalui pengalaman pengalaman tertentu.

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan tugas atau kewenanganya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Rachmawati, 2015). Menurut Yosefrinaldi (2013) mengartikan bahwa kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya didalam organisasi dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

2.1.4. Indikator Kapasitas Sumber Daya Manusia

Menurut Notoatmodjo, Soekidjo. (2018:16), Kapasitas Sumber Daya Manusia dapat diukur melalui:

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pendidikan dapat dibagi

menjadi: (a) pendidikan formal, (b) pendidikan informal, (c) pendidikan nonformal.

2. Pelatihan

Pelatihan yang baik, harus berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. pelatihan adalah usaha untuk memperbaiki performa pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.

3. Pengalaman

Pengalaman dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Dengan pengalaman, seseorang akan terbiasa melakukan suatu pekerjaan dan mempunyai wawasan yang luas serta mudah beradaptasi dengan lingkungan.

2.1.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut O'Brien (2005; 46) teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Sedangkan Menurut McLeod (2007; 71) mendefinisikan Teknologi Informasi adalah salah satu alat yang digunakan para manajer untuk mengatasi perubahan yang terjadi. Dalam hal ini perubahan yang dimaksud adalah perubahan informasi yang sudah diproses dan dilakukan penyimpanan sebelumnya di dalam komputer.

Menurut Lilis Puspitawati & Sri Dewi Anggradini (2011:6), pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah Sistem akuntansi pemerintahan daerah yang meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer.

Menurut Sutabri (2014:3), pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk

memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Menurut Mulyadi (2014:21), pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah Pemanfaatan teknologi informasi adalah yang mencakup komputer (baik perangkat keras dan perangkat lunak), berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah perbuatan memanfaatkan seperangkat alat yang digunakan manusia untuk membantu memproses informasi, menyimpan, dan kemudian mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi.

2.1.6. Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Suyanto (2005:11), Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat diukur melalui :

1. Perangkat Keras Komputer (*Hardware*)

Perangkat keras bagi suatu system informasi terdiri atas masukan dan keluran. Sebagai unit meyimpan file dan sebagainya, peralatan, penyiapan data dan terminal masukan dan keluaran.

2. Perangkat Lunak Komputer (*Software*)

Seperti system perangkat lunak yang dikembangkan guna mendukung pendistribusian data dan informasi seperti system pengoprasian. Dikembangkan juga beberapa metode dan aplikasi dan sistem yang berbasis computer untuk memenuhi kebutuhan pengguna, contohnya: *e-commerce*, *DSS (Decision Support System)*, *e-banking*, *SAP*, dan sebagainya.

3. Jaringan dan Komunikasi

Jaringan dan komunikasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan dan menggabungkan beberapa titik komunikasi menjadi satu kesatuan yang mampu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Berbagai macam cara digunakan untuk mempermudah dan menjaga kualitas hubungan melalui internet. Sejak saat itulah perkembangan alat-alat yang menyokong kemampuan jaringan untuk saling berhubungan berjalan dengan pesat

2.1.7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengertian sistem pengendalian internal menurut Jason Scott (2014:226) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai.

Sistem pengendalian internal menurut IAPI (2011:319.2) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan pengertian sistem pengendalian internal menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-

unsur yang ada di dalam perusahaan dengan memperhatikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2.1.8. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Hery (2014:160) tujuan dari pengendalian internal tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa:

1. Aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu. Dengan demikian, pengendalian internal diterapkan agar aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan dan kepentingan perorangan.
2. Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil resiko baik atas salah saji laporan keuangan yang disengaja atau tidak disengaja (kelalaian).
3. Karyawan telah menaati hukum dan peraturan yang berlaku.

2.1.9. Indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Mulyadi (2014:164) menyatakan bahwa ada 4 indikator pengendalian internal, yaitu sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas yang merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

2. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan

Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari

pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut.

3. Praktik yang Sehat

Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

4. Karyawan yang sesuai dengan tanggung jawab

Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat bergantung kepada manusia yang melaksanakannya.

2.1.10. Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuranukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus berkualitas, bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Bahwa informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai.

Menurut Erlina (2017 : 25), kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ukuran orang yang menilai atau merinci dari suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi yang

menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan uang dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston dialih bahasakan oleh Sam Setya utama (2008:9), mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut: "Kualitas laporan keuangan adalah idealnya laporan keuangan harusnya mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Informasinya harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa yang akan datang. Semakin tajam dan semakin jelas gambar yang disajikan lewat data financial, dan semakin mendekati kebenaran.

Adapun pengertian Laporan keuangan menurut Heri (2012:2) mendefinisikan laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

Menurut Kasmir (2012:45) Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan entitas pada periode tertentu laporan keuangan juga menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan atau instansi sekarang dan kedepan dengan melihat persoalan yang ada baik kelemahan maupun kekuatan guna mengambil keputusan ekonomi.

2.1.11. Tujuan Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Fahmi (2017 : 28), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan

disamping pihak manajemen perusahaan. Para pemakai laporan akan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan dan menilai keuangan.

2.1.12. Indikator Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Indikator Kualitas Laporan Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 :

1. Relevan

Informasi yang disajikan harus relevan dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.

2. Andal

Informasi harus jujur, akurat, dapat diverifikasi, bebas dari bias, dan bebas dari kesalahan material.

3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan harus bisa dibandingkan dengan laporan dari periode sebelumnya dan entitas lain untuk analisis yang efektif.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan harus dapat dipahami oleh pengguna dengan batas pemahaman yang sesuai.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
Muh. Hirzun, Yuli Astini, Agus Khazin Fauzi, Dony Hidayat (2024)	Pengaruh kualitas, Pemanfaatan Teknologi, SPI, dan Penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok	Secara parsial sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal

		tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Lombok Barat.
Resi andika putri, Siska Yulia Defitri, Witra Maison (2022)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan keuangan pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1) berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), Sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
Yusrawati dan Nina Cahyanti (2016)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Rokan Hilir)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah.
Rivaldy Manimprung, Lintje Kalangi, Natalia Gerungai (2018)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Manado	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Deasy Hary Rahman Puspita	Pengaruh Kapasitas Sumber daya Manusia Dan Pemanfaatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

dan Dewi Amalia 2018	Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon	pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah
-------------------------	--	--

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2025